

## Analisis Perbandingan Sistem Administrasi Negara: Korea Selatan dan Amerika Serikat

Putri Ambarwati Listiya Ningsih<sup>1</sup>, Neysa Shabrina<sup>2</sup>, Ardiansyah<sup>3</sup>, Syahrul Falah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: [putbar1226@gmail.com](mailto:putbar1226@gmail.com)<sup>1</sup>, [neysashab@gmail.com](mailto:neysashab@gmail.com)<sup>2</sup>, [ardiansyahyaha83@gmail.com](mailto:ardiansyahyaha83@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[syahrulfalah64@gmail.com](mailto:syahrulfalah64@gmail.com)<sup>4</sup>

---

### Article History:

Received: 28 Juni 2024

Revised: 08 Juli 2024

Accepted: 10 Juli 2024

**Keywords:** *Administrasi Negara, Korea Selatan, Amerika Serikat*

**Abstract:** *Administrasi negara mengacu pada sistem dan proses yang terkait dengan manajemen pengaturan berbagai lembaga negara yang ada di dalam suatu negara. Ini mencakup struktur organisasi, kebijakan publik, regulasi, serta berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya untuk menjalankan fungsinya. Ini juga administrasi negara berperan sebagai elemen yang mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, hukum, politik dan cara negara dalam mengelola dirinya sendiri secara keseluruhan. Begitu pula yang dilaksanakan oleh negara Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam mengoperasikan negaranya. Tujuan penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai sistem administratif, serta juga memberikan suatu informasi mengenai perbedaan, kesamaan serta keberhasilan dalam menjalankan suatu pemerintahan yang banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasar pada jurnal studi literatur, kajian teoritis dan metode review literatur. Berdasarkan kajian analisis literatur didapatkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara berbagai aspek yang diimplementasikan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat, dalam hal ini pula persamaan itu didapat dikarenakan kedua negara tersebut adalah negara yang bersahabat. Adapun perbedaan itu diperoleh karena perbedaan letak geografis serta sejarah keduanya. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan yang signifikan dari beberapa aspek akan tetapi kedua negara tersebut menjalin kerjasama bilateral dan saling mendukung satu sama lain.*

---

### PENDAHULUAN

Negara adalah entitas besar yang memiliki struktur dan sistem kompleks untuk mengatur kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Dengan memiliki aparat pemerintah, kebijakan publik, kewenangan, dan anggaran negara. Negara juga bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi-fungsinya untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban, dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Sebagai organisasi besar, negara memiliki peran yang sangat

---

penting dalam memastikan terwujudnya tatanan sosial yang adil dan harmonis bagi seluruh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut negara mengatur organisasi tersebut dengan menghadirkan sistem dalam melaksanakan sebuah pengaturan yang mana sistem tersebut dikenal dengan sistem administrasi negara. Negara memiliki hubungan yang erat dengan sistem administrasi negara yang merupakan mekanisme yang digunakan oleh negara untuk mengatur dan menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan. Sistem administrasi negara mencakup struktur, proses, dan mekanisme yang digunakan oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas administrasinya. Negara menggunakan sistem administrasi negara untuk mengatur kebijakan publik, mengelola sumber daya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Dengan adanya sistem administrasi negara yang efektif dan efisien, negara dapat menjalankan tugas-tugasnya secara teratur, transparan, dan akuntabel. Selain itu, sistem administrasi negara juga membantu negara dalam menjaga keteraturan, ketertiban, keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Melalui sistem administrasi negara, negara dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan pada prosedur yang jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga, dapat dikatakan bahwa negara dan sistem administrasi negara saling berkaitan dan saling mendukung dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Dalam konteks perbandingan administrasi negara, penting untuk memahami bahwa setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang unik dan berbeda. Perbandingan ini membantu dalam memahami perbedaan dan persamaan antara berbagai negara dalam hal struktur pemerintahan, kebijakan publik dan pelaksanaan program-program pemerintah. Dengan membandingkan berbagai aspek administrasi negara seperti kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya ini dapat mengidentifikasi bagaimana *best practice* yang mesti diterapkan di sebuah negara hal ini tentu juga menjadi *referensi* dalam melakukan administrasi negara. Perbandingan administrasi negara juga membantu dalam membangun kerjasama antar negara untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, administrasi negara menjadi penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang telah efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam hal ini berlaku pula administrasi negara di Korea Selatan yang bertransformasi dari segi politik dan ekonomi sejak pertengahan abad ke-20 setelah perang korea di tahun 1950-1953. Pemerintah Korea Selatan pada awalnya dihadapkan pada tugas besar untuk membangun institusi-institusi administratif yang mampu mengelola transformasi ekonomi yang cepat. Kebijakan industrialisasi yang dipimpin oleh pemerintah, sering kali melalui badan-badan pemerintah yang khusus. Secara politik, Korea Selatan memiliki sejarah yang bergejolak, dengan transisi dari pemerintahan otoriter menuju demokrasi pada akhir 1980 hingga 1990 dan dengan adanya hal tersebut Korea Selatan mengalami perkembangan signifikan dalam menghadapi tantangan baru seperti globalisasi, perubahan iklim dan perubahan demografis. Administrasi negara terus beradaptasi dan berevolusi untuk menjawab tantangan-tantangan dengan selalu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas politik yang relatif.

Merujuk pada hal itu pula administrasi negara di Amerika Serikat terpengaruh oleh prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan sistem federal yang mana mengembangkan sebuah pemerintahan yang berpusat pada konstitusi yang mengatur hubungan antara pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintahan lokal. Konsep federalisme dalam administrasi negara Amerika Serikat menempatkan negara bagian sebagai entitas yang memiliki otonomi signifikan dalam banyak aspek kebijakan, sementara pemerintah federal memiliki tanggung jawab utama dalam urusan nasional seperti kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut terkait dengan analisis perbandingan administrasi negara melalui perbandingan berbagai aspek.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Internet Searching atau studi pustaka. Internet Searching adalah proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan objek penelitian.

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui jurnal penelitian, internet, buku dan e-book yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Negara Amerika Serikat dan Korea Selatan**

Sejarah Amerika Serikat adalah cerita yang kompleks dan beragam, dimulai dari pendirian koloni-koloni Inggris awal di benua Amerika hingga menjadi salah satu kekuatan dominan di dunia saat ini. Berikut ini adalah ringkasan yang mencakup beberapa titik penting dalam sejarah Amerika Serikat:

1. Perang Kemerdekaan (1775-1783)

Konflik antara koloni-koloni dan pemerintah Inggris mencapai puncaknya dalam Perang Kemerdekaan Amerika Serikat (1775-1783). Deklarasi Kemerdekaan AS pada tahun 1776 menandai awal dari upaya untuk merdeka dari kekuasaan Inggris, yang kemudian berhasil setelah kemenangan mereka dalam perang.

2. Pembentukan Konstitusi (1787)

Setelah kemerdekaan, para pemimpin kolonial bertemu di Konvensi Konstitusi pada tahun 1787 untuk merancang Konstitusi Amerika Serikat. Dokumen ini menetapkan dasar bagi pemerintahan federal yang terbagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta membagi kekuasaan antara pemerintah federal dan negara-negara bagian (federalisme).

3. Ekspansi Wilayah (Abad ke-19)

Selama abad ke-19, AS mengalami ekspansi besar-besaran ke barat dan juga terlibat dalam perang seperti Perang Saudara Amerika (1861-1865), yang mengakhiri perbudakan, serta perang-perang dengan pribumi Amerika dan perang-perang di luar negeri seperti Perang Spanyol-Amerika (1898).

4. Abad ke-20 dan perkembangan modern

Abad ke-20 melihat AS menjadi kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia. Negara ini terlibat dalam Perang Dunia I dan II, membentuk aliansi seperti NATO, dan terlibat dalam Perang Dingin dengan Uni Soviet. AS juga mengalami gerakan hak sipil yang signifikan dan perjuangan untuk hak-hak sosial dan ekonomi.

5. Masa Kontemporer

Pasca-Perang Dingin, AS tetap menjadi pusat ekonomi global dan berperan aktif dalam politik internasional, meskipun menghadapi tantangan dalam hal ekonomi, keamanan, dan masalah internal seperti ketidaksetaraan ekonomi dan politik.

Sejarah Korea Selatan mencakup perjalanan yang panjang dari masa pra-sejarah hingga menjadi salah satu kekuatan ekonomi maju di Asia saat ini. Berikut adalah ringkasan yang mencakup beberapa titik penting dalam sejarah Korea Selatan:

1. Zaman Kuno dan Zaman Tiga Kerajaan (Abad ke-1 hingga ke-7 M)  
 Semenjak abad ke-1 Masehi, semenanjung Korea terbagi menjadi tiga kerajaan utama: Goguryeo, Baekje, dan Silla. Silla menjadi yang paling dominan di antara ketiganya dan akhirnya berhasil menyatukan seluruh semenanjung Korea pada tahun 668 Masehi.
2. Dinasti Goryeo dan Joseon (Abad ke-10 hingga ke-20)  
 Dinasti Goryeo (918-1392) menggantikan Silla sebagai penguasa utama Korea. Pada abad ke-14, Dinasti Joseon (1392-1910) berkuasa dengan membawa sistem konfusianisme yang kuat dan mendorong perkembangan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.
3. Penjajahan Jepang (1910-1945)  
 Pada awal abad ke-20, Korea menjadi koloni Jepang setelah invasi tahun 1910. Penjajahan ini berlangsung dengan keras dan menciptakan penderitaan sosial dan politik yang mendalam di Korea.
4. Pembagian Korea dan Perang Korea (1945-1953)  
 Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Korea dibagi menjadi dua zona pendudukan oleh Amerika Serikat di bagian selatan dan Uni Soviet di bagian utara. Pada tahun 1948, Republik Korea (Korea Selatan) didirikan di bawah pemerintahan Syngman Rhee, sementara Korea Utara mendirikan Republik Demokratik Rakyat Korea di bawah Kim Il-sung. Perang Korea pecah pada tahun 1950 dan berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953, meninggalkan Korea Selatan dalam kondisi perekonomian yang hancur.
5. Modernisasi dan Pembangunan Ekonomi (1960-an hingga 1990-an)  
 Pada tahun 1960-an, Korea Selatan mengalami transformasi ekonomi yang luar biasa dengan fokus pada industrialisasi dan ekspor. Pemerintah berperan aktif dalam mengembangkan industri-industri seperti elektronik, otomotif, dan manufaktur, yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
6. Demokratisasi dan Perkembangan Modern (1990-an hingga Sekarang)  
 Sejak tahun 1980-an, Korea Selatan telah mengalami proses demokratisasi yang kuat setelah berbagai demonstrasi massa dan tekanan internasional. Pemilihan presiden langsung pertama diadakan pada tahun 1987, menandai awal dari pemerintahan sipil yang stabil dan bergantian kekuasaan antara partai politik.
7. Korea Selatan di Abad ke-21  
 Pada abad ke-21, Korea Selatan telah menjadi salah satu pusat ekonomi dan teknologi global, dengan perusahaan-perusahaan seperti Samsung, Hyundai, dan LG mendominasi pasar internasional. Negara ini juga terus berjuang dengan tantangan seperti ketegangan regional dengan Korea Utara, masalah sosial seperti kesenjangan pendapatan, dan isu-isu lingkungan.

### **Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan Korea Selatan**

Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) dimulai pada tahun 1948, setelah Perang Dunia II dan berdirinya dua negara Korea yang terpisah. Awalnya, AS berperan penting dalam membantu Korsel membangun demokrasi dan mengembangkan perekonomiannya. Namun, hubungan mereka semakin diperkuat oleh Perang Korea (1950-1953), di mana AS memberikan bantuan militer yang signifikan kepada Korsel dalam menghadapi invasi Korea Utara. Setelah Perang Dunia II, AS menduduki Korea selatan garis lintang 38, sementara

Uni Soviet menduduki Korea utara. Pada tahun 1948, kedua negara Korea memproklamasikan kemerdekaan mereka, dengan Syngman Rhee menjadi presiden pertama Korsel. AS segera mengakui Korsel sebagai negara merdeka dan memberikan bantuan ekonomi dan teknis untuk membantu membangun pemerintahan dan perekonomiannya. AS juga memainkan peran penting dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang memberikan dukungan bagi Korsel.

Pada tanggal 25 Juni 1950, Korea Utara menginvasi Korea Selatan, memulai Perang Korea. AS, sebagai anggota tetap PBB, segera memberikan bantuan militer kepada Korsel. Perang tersebut berlangsung selama tiga tahun dan berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953. Selama Perang Korea, AS mengerahkan lebih dari 300.000 tentara ke Korsel dan memberikan bantuan militer senilai miliaran dolar. Bantuan AS sangat penting dalam mencegah Korea Utara menaklukkan seluruh Semenanjung Korea. Setelah Perang Korea, AS mempertahankan kehadiran militer di Korsel untuk mencegah agresi lebih lanjut dari Utara. Kehadiran ini, bersama dengan Perjanjian Pertahanan Bersama Amerika Serikat-Republik Korea yang ditandatangani pada tahun 1953, membentuk dasar aliansi militer yang kuat antara kedua negara. AS juga terus memberikan bantuan ekonomi dan teknis kepada Korsel. Bantuan ini membantu Korsel membangun kembali perekonomiannya dan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

Hubungan AS-Korsel semakin diperkuat oleh nilai-nilai bersama demokrasi, kebebasan, dan supremasi hukum. Kedua negara juga memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan yang saling menguntungkan. Aliansi AS-Korsel telah menjadi salah satu aliansi paling penting di kawasan Asia-Pasifik, dan kemungkinan besar akan terus memainkan peran penting di tahun-tahun mendatang. Setelah Perang Korea, AS mempertahankan kehadiran militer di Korsel untuk mencegah agresi lebih lanjut dari Utara. Kehadiran ini, bersama dengan Perjanjian Pertahanan Bersama Amerika Serikat-Republik Korea yang ditandatangani pada tahun 1953, membentuk dasar aliansi militer yang kuat antara kedua negara. AS dan Korsel melakukan latihan militer bersama secara teratur dan bekerja sama dalam masalah keamanan regional. AS juga merupakan pendukung kuat reunifikasi Korea secara damai. Selain aliansi militer, AS dan Korsel juga mengembangkan hubungan ekonomi yang kuat. AS adalah mitra dagang terbesar Korsel dan Korsel adalah mitra dagang kelima terbesar AS. Kedua negara menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas pada tahun 2012, yang semakin meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Hubungan sosial dan budaya antara AS dan Korsel juga berkembang pesat. Banyak orang Korea-Amerika tinggal di AS, dan banyak orang Amerika tinggal dan bekerja di Korsel. Kedua negara berbagi minat dalam budaya populer, seperti K-pop dan film Korea. Selama beberapa dekade, hubungan AS-Korsel telah tumbuh dan berkembang, menjadi salah satu aliansi paling penting di kawasan Asia-Pasifik. Aliansi ini didasarkan pada nilai-nilai bersama demokrasi, kebebasan, dan supremasi hukum, serta kepentingan ekonomi dan keamanan yang saling menguntungkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan AS-Korsel menghadapi tantangan baru, termasuk meningkatnya ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara. AS dan Korsel telah bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka dan menerapkan sanksi terhadap Korea Utara. Pada saat yang sama, kedua negara terus memperkuat hubungan ekonomi dan sosial budaya mereka. AS dan Korsel menandatangani perjanjian investasi pada tahun 2022, dan kedua negara terus bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk energi, teknologi, dan pendidikan. Hubungan AS-Korsel adalah aliansi yang kompleks dan berlapis-lapis. Ini didasarkan pada sejarah, nilai-nilai bersama, dan kepentingan bersama. Aliansi ini telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik, dan kemungkinan besar akan terus memainkan peran penting di tahun-tahun mendatang.

### Perbandingan Konsentrasi Konstitusional dan Administrasi Negara antara Korea Selatan dan Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, konsentrasi konstitusional cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Korea Selatan karena adanya pemisahan kekuasaan yang ketat antara cabang-cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif). Pemerintahan federal AS didasarkan pada Konstitusi yang menetapkan batas-batas kekuasaan pemerintah federal dan negara bagian serta hak-hak individual. Berikut adalah bentuk administrasi atau analisis konstitusional Amerika Serikat, antara lain:

1. Sistem Pemerintahan: AS memiliki sistem pemerintahan federal yang terdiri dari tiga cabang utama: eksekutif (Presiden), legislatif (Kongres), dan yudikatif (Pengadilan Agung). Pemisahan kekuasaan ini didesain untuk mencegah terakumulasinya kekuasaan pada satu institusi atau individu.
2. Konstitusi: Konstitusi AS merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur kekuasaan federal dan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. Konstitusi juga menjamin hak-hak individu melalui Amendemen-amendemennya.
3. Kekuasaan Eksekutif: Meskipun Presiden AS memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, terdapat keterbatasan-keterbatasan yang diberlakukan oleh Kongres dan Pengadilan Agung. Misalnya, Kongres memiliki wewenang untuk melegislasikan hukum, sedangkan Pengadilan Agung mempunyai kekuasaan untuk menafsirkan hukum dan memutuskan keabsahan tindakan-tindakan pemerintah.
4. Checks and Balances: Sistem "*checks and balances*" di AS memastikan bahwa tidak ada satu cabang pemerintah yang dapat secara dominan mengendalikan pemerintahan. Misalnya, Presiden dapat memveto undang-undang Kongres, tetapi Kongres dapat mengesahkan undang-undang tersebut kembali dengan mayoritas suara yang cukup.

Korea Selatan memiliki sistem presidensial yang mirip dengan AS tetapi dengan sejarah politik yang berbeda. Sejarah Korea Selatan telah melihat beberapa periode di mana konsentrasi kekuasaan eksekutif mungkin lebih besar atau lebih kecil tergantung pada kebijakan dan perubahan politik dalam negeri.

1. Sistem Pemerintahan: Korea Selatan juga memiliki sistem pemerintahan presidensial, mirip dengan AS, di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
2. Konstitusi: Konstitusi Korea Selatan mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara. Seperti AS, konstitusi ini membagi kekuasaan antara eksekutif, legislatif (Dewan Nasional) dan yudikatif (Mahkamah Konstitusi).
3. Kekuasaan Eksekutif: Presiden Korea Selatan memiliki kekuasaan yang signifikan dalam mengambil keputusan pemerintahan sehari-hari dan dalam kebijakan luar negeri. Namun, konstitusi juga memberi batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan ini.
4. Pengaturan dan Perubahan Konstitusional: Korea Selatan memiliki sejarah politik yang dinamis yang telah melihat perubahan dalam konsentrasi kekuasaan eksekutif dari waktu ke waktu, tergantung pada pemerintahan yang berkuasa dan dinamika politik dalam negeri.

Jadi, perbandingan ini akan sangat tergantung pada bagaimana masing-masing negara menerapkan dan menghormati prinsip-prinsip konstitusional mereka dalam praktek pemerintahan sehari-hari. Perbandingan konsentrasi konstitusional Administrasi Negara antara Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kedua

negara mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintahan mereka sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dan dalam hal ini AS dan Korea Selatan memiliki sistem pemerintahan yang serupa dalam hal struktur presidensial dan pemisahan kekuasaan, perbedaan dalam konsentrasi konstitusional mereka sering kali tercermin dalam praktek politik dan kelembagaan. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat melihat bagaimana masing-masing negara mengelola kekuasaan dan menerapkan prinsip-prinsip konstitusional dalam konteks mereka sendiri.

### **Dinamika Sosial Budaya terhadap Keberadaan Perpolitikan di Korea Selatan dan Amerika Serikat**

Dinamika sosial budaya memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengaruh politik di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kedua negara ini memiliki konteks sosial budaya yang unik, yang secara langsung mempengaruhi struktur dan dinamika politik mereka.

Di Amerika Serikat, budaya politik yang terbuka dan pluralis mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang mengakar kuat. Amerika Serikat dikenal dengan masyarakatnya yang beragam, baik dari segi etnis, agama, maupun latar belakang sosial. Keberagaman ini menciptakan spektrum politik yang luas, dari liberal hingga konservatif, dengan partai-partai utama seperti Demokrat dan Republik yang mendominasi arena politik. Perdebatan politik di Amerika Serikat sering kali dipengaruhi oleh isu-isu sosial budaya seperti hak-hak minoritas, kebebasan beragama, dan kebebasan berbicara. Media massa dan platform media sosial juga memiliki peran signifikan dalam membentuk opini publik dan dinamika politik di negara ini, seringkali mempercepat penyebaran informasi dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik terkini. Berikut adalah dinamika sosial budaya di Amerika Serikat, antara lain:

1. **Pluralisme dan Multikulturalisme:** Amerika Serikat dikenal sebagai "melting pot" dengan populasi yang sangat beragam etnis, agama, dan budaya. Pluralisme ini mempengaruhi dinamika politik di mana isu-isu identitas, hak minoritas, dan inklusivitas menjadi tema sentral dalam politik domestik. Partai politik seperti Demokrat sering kali mengadvokasi kebijakan yang mendukung keberagaman dan perlindungan hak-hak sipil, sementara Partai Republik cenderung lebih konservatif dalam pendekatan mereka.
2. **Individualisme dan Libertarianisme:** Budaya Amerika sangat menekankan pada individualisme dan kebebasan pribadi, yang tercermin dalam politiknya. Konsep kebebasan ini mendorong pandangan libertarianisme yang menekankan pada minimnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari debat yang sering muncul terkait hak kepemilikan senjata, kebebasan berpendapat, dan kebijakan pajak.
3. **Pengaruh Agama:** Meski Amerika Serikat adalah negara sekuler, agama memainkan peran penting dalam politik. Kelompok-kelompok agama, terutama Kristen Evangelis, memiliki pengaruh besar dalam politik, khususnya dalam Partai Republik. Isu-isu seperti aborsi, pernikahan sesama jenis, dan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh pandangan keagamaan.
4. **Media dan Teknologi:** Media massa dan media sosial memiliki dampak besar terhadap politik Amerika. Peran media dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi hasil pemilu sangat signifikan. Teknologi informasi telah mengubah cara kampanye politik dijalankan, dengan penggunaan data analitik dan iklan digital yang ditargetkan.

Sebaliknya, di Korea Selatan, dinamika sosial budaya terhadap politik mencerminkan sejarah panjang perjuangan untuk demokrasi dan modernisasi yang cepat. Setelah melewati periode

otoritarianisme pada abad ke-20, Korea Selatan telah mengalami transisi demokratis yang signifikan. Budaya politik di Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan hierarki, penghormatan terhadap otoritas, dan harmoni sosial. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat, masyarakat Korea Selatan menjadi lebih kritis terhadap pemerintah dan menuntut transparansi serta akuntabilitas. Generasi muda, khususnya, menunjukkan tingkat partisipasi politik yang tinggi dan sering kali mengorganisir protes untuk memperjuangkan isu-isu seperti korupsi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi. Media, baik tradisional maupun digital, juga memainkan peran kunci dalam menciptakan kesadaran politik dan mobilisasi sosial di Korea Selatan. Berikut adalah dinamika sosial budaya di Korea Selatan, antara lain:

1. **Konfusianisme dan Hierarki Sosial:** Budaya Korea Selatan dipengaruhi oleh nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan pada hierarki, kesopanan, dan penghormatan terhadap otoritas. Hal ini tercermin dalam politik Korea Selatan di mana struktur hierarkis dan patronase politik masih kuat. Pengaruh keluarga dan hubungan pribadi sering kali memainkan peran penting dalam karir politik.
2. **Pendidikan dan Meritokrasi:** Pendidikan dianggap sangat penting di Korea Selatan, dan ini memengaruhi politik. Tingkat pendidikan yang tinggi dan persaingan yang ketat dalam sistem pendidikan menciptakan masyarakat yang sangat meritokratis. Politisi sering kali berasal dari latar belakang akademis yang kuat dan universitas ternama.
3. **Gerakan Sosial dan Aktivisme:** Korea Selatan memiliki sejarah panjang gerakan sosial dan aktivisme politik. Sejak masa kolonial Jepang hingga gerakan demokratisasi pada 1980-an, masyarakat Korea Selatan telah menunjukkan kesadaran politik yang tinggi dan sering kali terlibat dalam protes dan demonstrasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ini terus berlanjut dengan isu-isu kontemporer seperti hak-hak pekerja, kesetaraan gender, dan korupsi.
4. **Dinamika Regional dan Ancaman Keamanan:** Politik Korea Selatan juga sangat dipengaruhi oleh dinamika regional, khususnya hubungan dengan Korea Utara. Ancaman keamanan dari Korea Utara dan kehadiran militer Amerika Serikat di semenanjung Korea mempengaruhi kebijakan luar negeri dan pertahanan Korea Selatan. Isu reunifikasi dan hubungan antar-Korea menjadi topik sentral dalam politik domestik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan perbandingan sistem administrasi negara antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam pendekatan dan struktur administratif mereka. Amerika Serikat menerapkan sistem federal dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian, sementara Korea Selatan memiliki sistem administrasi yang lebih terpusat dengan fokus pada efisiensi dan kontrol dari pemerintah pusat. Secara khusus, Korea Selatan cenderung memiliki birokrasi yang lebih terpusat dan kuat, dengan peran penting dari kementerian-kementerian utama dalam mengatur dan mengawasi kebijakan nasional. Di sisi lain, Amerika Serikat menunjukkan ciri khas federalisme yang mengizinkan otonomi yang lebih besar bagi negara-negara bagian untuk mengatur sebagian besar urusan domestik mereka sendiri, meskipun pemerintah federal tetap memiliki wewenang yang signifikan dalam kebijakan nasional. Korea Selatan sering kali dianggap memiliki sistem administrasi yang lebih efisien dan cepat dalam mengambil keputusan, sementara Amerika Serikat menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam merespons kebutuhan dan aspirasi yang beragam dari masyarakatnya yang beraneka ragam. Kesimpulannya, perbedaan ini mencerminkan prioritas

politik, sejarah, dan nilai-nilai yang berbeda antara kedua negara tersebut dalam mengelola administrasi negara mereka.

#### DAFTAR REFERENSI

- Fatin, A. D., M. D. S., Hang, U., Surabaya, T., & Artikel, H. (2024). *Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Sistem Administrasi Negara Thailand*. 9(8), 1–12.
- Haryono, N. (2021). *Perbandingan reformasi manajemen publik indonesia dan perancis*. 05(02).
- L, L., & A.A.R, A. (2018). Kerja Sama Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam THAAD sebagai Respon Atas Uji Coba Misil Balistik Korea Utara Pada Periode 2013-2017. *Balcony*, 2(2), 103–114.
- M, Y, A., & A.N, F. (2021). Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat dan Korea Selatan. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 211.
- Marsha Maryam, S., & Maujana Saragih, H. (2023). Kebijakan HAM di Amerika Serikat dan Australia pada Resonansi Gerakan Black Lives Matter. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(2), 200–2012.
- N, W. (2015). *Perbandingan Administrasi Negara Antara Indonesia dengan Korea Utara*. 13(3), 1576–1580.
- Partiah, S. (2023). Studi Komparasi Hubungan Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Givernance*, 3(2), 148–164.